

Judul : Safari Panja Perguruan Tinggi Kampus Didorong Untuk Mencetak SDM Unggul
Tanggal : Sabtu, 28 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Safari Panja Perguruan Tinggi

Kampus Didorong Untuk Mencetak SDM Unggul

PANITIA Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR menggelar pertemuan dengan berbagai universitas di beberapa daerah di Indonesia. Tujuannya, untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, kunjungan itu bertujuan menyerap aspirasi guna mewujudkan visi Indonesia 2045 dalam sistem pendidikan. Kemajuan lembaga pendidikan akan berdampak pada kemampuan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM)

unggul. "Tapi adanya SDM yang unggul, berpengetahuan dan berketerampilan itu tidak cukup. Yang lebih penting, SDM di Indonesia memiliki mental, karakter, moral kuat, jujur, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab," tegas politikus Golkar ini. Hetifah menuturkan, perguruan tinggi adalah satu institusi penting untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, bukan hanya dari segi pengetahuan tapi juga karakter dan mental. Tentu saja, itu membutuhkan

satu dukungan kebijakan dengan anggaran yang memadai. Komisi X DPR, lanjutnya, berharap tujuan dan cita-cita dari perguruan tinggi untuk bisa menghasilkan SDM berkualitas itu bisa dipenuhi. Salah satu masalah yang membutuhkan perhatian adalah ketersediaan anggaran. Hetifah menyadari, untuk menjaga dan meningkatkan mutu perguruan tinggi membutuhkan biaya tidak sedikit. Biaya tersebut digunakan untuk akreditasi kampus yang dilakukan secara terus-menerus. Juga,

meningkatkan kapasitas tenaga pengajar dengan cara melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan menambahkan, salah satu tujuan dibentuknya Panja Perguruan Tinggi untuk mengetahui persoalan yang dihadapi dunia pendidikan tinggi. Pasalnya, banyak lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang tidak terserap dalam dunia kerja. "Kita tahu jumlah universitas swasta tiga ribuan lebih, sedangkan universitas negeri seratusan. Tentu dari alokasi dana yang be-

sar itu harus terbagi juga dengan kampus swasta," ujar Sofyan dalam keterangannya, kemarin. Sofyan melihat, saat ini terjadi ketimpangan antara sistem pendidikan di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Namun, Kemendikbud saat ini sudah memberikan perhatian yang lebih kepada sarana dan prasarana maupun pembiayaan terhadap perguruan tinggi yang berada di luar Pulau Jawa. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), lanjutnya, diharapkan dapat meletakkan perguruan tinggi negeri dan swasta itu secara seajar.

Karena keduanya sama-sama memberikan pendidikan kepada rakyat dan tentu tidak boleh ada diskriminasi di antara keduanya. Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng menambahkan, dunia pendidikan tidak bisa diubah dalam kurun waktu cepat. Dibutuhkan waktu yang cukup untuk mengimplementasikan dan mensinkronisasi kebijakan baru dengan situasi yang ada di lapangan. Agustina mencontohkan, ketika seseorang ingin menyiapkan jurnal-jurnal untuk menjadi

guru besar, maka dibutuhkan waktu dua sampai tiga tahun. Tapi ketika jurnal sudah jadi dan siap diunggah, sistemnya sudah berubah. Untuk itu, Agustina menginginkan ada kebijakan khusus untuk sistem baru Kemendikbud. Soalnya, ada beberapa macam peraturan yang tidak sinkron. Seperti, peraturan dosen sebagai pegawai negeri yang tidak sinkron dengan sistem yang dilaksanakan saat ini. "Hal ini tidak bisa sehari dua hari kita membetulkannya," tandasnya. ■ TIF